

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya teknologi pada era saat ini menuntut berbagai orang dan kalangan untuk melakukan perubahan dalam berbagai hal/aspek kehidupan. Terutama dalam hal memenuhi kebutuhan informasi. Bagi lembaga formal atau instansi pemerintah, informasi keuangan sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan ekonomi secara cepat, tepat dan akurat.

Akuntansi adalah suatu seni (dikatakan seni karena perlu kerapian, ketelitian, kebersihan) pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan dengan cara yang baik dalam unit moneter atas transaksi-transaksi keuangan dan kejadian-kejadian lain sehubungan dengan keuangan instansi dan menafsirkan hasil-hasil pencatatan tersebut. Transaksi-transaksi keuangan akan diproses sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang siap digunakan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (good governance), pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Usaha reformasi keuangan negara mencakup peraturan perundang-undangan, kelembagaan, sistem, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2014). Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum.

Setiap lembaga atau instansi pemerintah dibentuk sebagai organisasi yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi menyediakan pelayanan sesuai dengan fungsinya bagi masyarakat dan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Sebagian besar sumber dana yang diperoleh pemerintah berasal dari pajak, donasi atau sumbangan, utang, laba perusahaan negara atau daerah, sumber lainnya. Pemerintah sebagai manajemen yang mengelola keuangan negara memiliki tugas khusus dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber-sumber dana tersebut kepada masyarakat selaku pembayar pajak, donatur, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Laporan keuangan yang dilaporkan setiap lembaga atau instansi pemerintah akan memperlihatkan gambaran kondisi keuangan lembaga tersebut. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi, dengan informasi laporan keuangan yang dilaporkan untuk memprediksi apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keagamaan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Instansi ini bergerak dalam bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya

adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengangkat judul Tugas Akhir “Mekainisme Penyusunan Laporan Keuangan pada pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas maka saya merumuskan masalah yaitu bagaimana mekanismepenyusunan laporan keuangan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan magang ini yaitu: Untuk mengetahui MekanismePenyusunan Laporan Keuangan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat

1. Bagi Pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
Hasil dari penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan.

2. Bagi Penulis

Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini, manfaat yang dapat diperoleh bagi penulis dapat memahami bagaimana Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, memperkaya pengetahuan penulis mengenai akuntansi, dan juga dapat dijadikan sarana dalam menrapkan pengetahuan yang didapat selama mengikuti perkuliahan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang yang mengungkapkan ulasan pemilihan topik rumusan masalah yang merupakan dasar isi dan pembahasan. Tujuan penulisan yang menjawab rumusan masalah, manfaat yang diterima oleh penulis maupun pihak lain, dan sistematika pelaporan berisi tentang hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam tugas akhir secara umum.

BAB II: LANDASAN TEORI

Menguraikan secara teori tentang pengertian mekanisme, pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, peranan laporan

keuangan, komponen-komponen laporan keuangan dan standar akuntansi pemerintahan.

BAB III: GAMBARAN UMUM

Menguraikan tentang hal yang berkaitan dengan instansi yang terdiri dari sejarah berdirinya instansi, visi dan misi, struktur organisasi serta bentuk kegiatan atau aktivitas instansi.

BAB IV: PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil kegiatan penelitian mengenai mekanisme penyusunan laporan keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

BAB V: PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil pengamatan keseluruhan dari pelaksanaan yang telah dilakuka



